

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Siregar: 2017).

Melihat pentingnya peranan pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih; serta laporan finansial berupa neraca,

laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) (Halim, 2014).

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Laporan keuangan OPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Erlina, 2015).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, diperlukan adanya kebijakan anggaran yang merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi

pada terciptanya *good public* dan *good govermence* (Tamasoleng, 2015). Maka secara garis besar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, oleh karena itu diperlukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif serta efisien (Julita, 2011).

Pemerintah Daerah diasumsikan sebagai pembuat keputusan yang rasional diharapkan mampu memilih program dan kegiatan yang berkaitan dengan APBD dengan sangat efektif dan efisien. Menurut Halim (2007), pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sementara Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah.

Kabupaten Jepara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan objek penelitian yang menarik, dikarenakan Kabupaten

Jepara terus meningkatkan kinerja aparatur daerahnya, hal ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sampai 2017, adapun realisasi sumbangan PAD yang cenderung mengalami peningkatan. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat Laporan Realisasi Anggaran pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 - 2017 Kabupaten Jepara sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008- 2017**  
**Pemerintah Kabupaten Jepara**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	Anggaran	Realisasi	Prosentase Realisasi (%)	Prosentase Pertumbuhan PAD (%)
2008	62,003,754,000	67,984,834,320	110%	-
2009	68,098,430,000	71,919,859,343	105,61%	5.79%
2010	76.832.316.000	84.734.935.696	110,29%	17.82%
2011	98.041.215.000	103.642.014.200	105,71%	22.31%
2012	113.150.581.000	129.076.570.089	114,1%	24.54%
2013	118.924.090.000	124.134.113.124	104,4%	-3.83%
2014	187.999.722.000	231.673.059.919	123,2%	86.86%
2015	217.291.915.000	271.434.442.877	124,9%	17.16%
2016	267.803.989.000	322.509.753.285	120,4%	18.82%
2017	300,243,532,000	325,530,346,533	108,4%	0.94

Sumber : BPKAD Jepara 2017 (data diolah)

Sektor Pariwisata, Hotel, Industri dan Perikanan serta dari retribusi pajak daerah yang diperoleh dari masyarakat diharapkan mampu meningkatkan otonomi Kabupaten Jepara dalam mengoptimalkan potensi bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah terhadap publik (*stakeholder*) perlu mendapat perhatian agar penggunaan dana yang ada tepat sasaran untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah kabupaten jepara harus mampu mengoptimalkan anggaran secara efektif dan efisien, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

Untuk itu penulis ingin menganalisis bagaimana Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara".

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Bentuk dari penelitian ini adalah survei atas data sekunder yang mengambil lokasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dengan menggunakan data yang telah disusun oleh Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, meliputi data perhitungan Anggaran Pendapatan dan

belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah merupakan pernyataan mengenai kondisi dimana masih memerlukan penelitian atau pengamatan untuk menjawabnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah bagi penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2017 ?
2. Bagaimana Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2017 ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2017.
2. Untuk mengetahui Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2017.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis serta pengetahuan bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu :

### 1. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk mempelajari dan mengevaluasi tentang "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara".

### 2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Jepara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat berguna dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melakukan evaluasi serta perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 3. Manfaat Bagi Pembaca

Penulis berharap hasil penelitian bermanfaat dan mempunyai nilai positif bagi pihak lain, juga diharap dapat menjadi masukan ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai objek yang diteliti untuk dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang ada dalam penelitian lanjutan.